

## Prabowo Perintahkan Hapus .....

Dari Halaman 1

melakukan impor. "Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," ucap Prabowo. Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar," ucap dia. Salah satu komoditas yang ia usulkan dibebas-

kan dari kuota impor adalah daging. Dia menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membuka peluang impor komoditas tersebut bagi siapa pun. "Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja," kata Prabowo. (kps/js)

## Kepala Banggar DPR Respons .....

Dari Halaman 1

barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan momen tepat mereformasi kebijakan impor.

Terlebih, telah tercatat banyak penyalahgunaan kewenangan yang bermula dari pelaksanaan kebijakan kuota impor, seperti kasus kuota impor beras pada 2007, kasus kuota impor daging sapi di 2013, kasus kuota impor gula kristal di 2015, hingga kasus kuota impor bawang putih di 2019. Menurut Said, Banggar DPR pada 21 Februari 2020 sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif.

Pada Maret lalu, Banggar DPR RI kembali mendorong pemerintah mengubah kebijakan impor dari sistem kuota menjadi pengenaan tarif. Pasalnya, dengan kebijakan tarif, Indonesia mendapatkan barang impor yang lebih adil dan kompetitif, juga peluang mendapatkan penerimaan negara dari bea masuk.

Langkah Prabowo itu antara lain juga sebagai respons atas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Said menegaskan, khusus untuk barang-barang impor komoditas

hajat hidup orang banyak perlu mendapatkan pembebasan tarif.

"Secara makro, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik," kata Said.

Menurutnya, kebijakan tarif Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan AS tidak defisit kian mendalam.

Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan termasuk bahwa kebijakan impor agar diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaannya di dalam negeri. Ke depannya nanti, Indonesia diyakini mampu memenuhi kebutuhan barang impor dengan produksi sendiri.

Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi.

"Kebijakan impor harus mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang semakin besar persinya. Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil

nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya," papar Said.

Dengan kompleksitas kebutuhan akan produk barang dan jasa, serta kait mengait dari rantai pasok, pemerintah dan pelaku usaha didorong untuk tidak bergantung kepada negara tertentu. Said mengungkapkan, dibutuhkan perluasan negara tujuan impor sebagai alternatif.

Sementara pada deregulasi kebijakan impor, khususnya dari sektor pangan dan energi, diharapkan mempermudah akses rakyat terhadap komoditas terkait, tetapi juga dengan tingkat harga yang lebih terjangkau. Sehingga, barang impor yang menjadi public good tidak menjadi beban ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah.

Said juga menambahkan menyambut ratifikasi perjanjian Free Trade Agreement (FTA) bersama 18 negara dengan berbagai skema, baik bilateral, regional maupun multilateral.

"Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang-barang Indonesia, dengan demikian manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional," pungkas Said. (cnni/js)

## Mulyani: Akan Sangat Membantu .....

Dari Halaman 1

oleh Bapak Presiden ini akan sangat membantu karena kuota itu tidak memberikan penerimaan negara menambah beban transaksi dan menimbulkan

ketidaktransparanan," ujar Sri Mulyani dalam acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Kalau ini dihapus akan sangat menentukan perbaikan dari sisi impor-ekspor Indonesia," tegasnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah akan menyederhanakan perizinan dan tata kelola impor dengan berbasis data dan teknologi informasi (TI). Nantinya, semua transaksi logistik impor akan tercatat secara digital sehingga bisa menurunkan waktu dan biaya logistik. (kps/js)

## China Patok 84% untuk Produk .....

Dari Halaman 1

yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump yang mulai berlaku hari ini, Rabu (9/4).

Tarif baru dari China ini juga merupakan balasan setelah AS menambah bea masuk impor produk dari Tiongkok menjadi 104 persen.

Dikutip Reuters, AS mulai menerapkan tarif perdagangan ke puluhan negara mulai hari ini. Selain China, Uni Eropa pun tengah menyiapkan langkah membalas tarif resiproskal dari Trump ini yang akan diumumkan pada Rabu malam waktu setempat.

Tarif yang dijatuhkan Trump telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kebijakan ini

memicu kekhawatiran akan resesi dan menghapus nilai pasar triliunan dolar dari berbagai perusahaan besar dunia.

Alasan Trump menerapkan peningkatan tarif dagang ke puluhan negara ini karena merasa neraca perdagangan AS dengan negara-negara tersebut tidak lah adil. Trump merasa AS lebih banyak menerima produk-produk impor ketimbang produk AS yang diekspor ke luar negeri.

Sementara itu, China menganggap surplus perdagangannya dengan AS sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Beijing memperingatkan AS bahwa China memiliki "tekad dan kemampuan" untuk terus melawan jika Trump tetap menargetkan produk-produk China.

Mata uang China, yuan, berada di bawah tekanan hebat dan mencatat rekor terendah di pasar

luar negeri akibat kebijakan tarif ini. Namun, sumber Reuters menyebut bahwa bank sentral China telah meminta bank-bank milik negara untuk mengurangi pembelian dolar AS, dan tidak akan membiarkan yuan terdepresiasi terlalu tajam.

China juga menyampaikan keluhannya kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait perang tarif Trump ini. Beijing menyatakan bahwa tarif yang diberlakukan AS berpotensi semakin mengganggu stabilitas perdagangan global.

"Situasinya semakin berbahaya... Sebagai salah satu pihak yang terdampak, China menyampaikan keprihatinan mendalam dan penolakan keras terhadap langkah sembrono ini," tulis pernyataan resmi China melalui perwakilannya di WTO. (cnni/js)

## Akan 'Serang' Layanan Daring .....

Dari Halaman 1

dapi perang dagang ini," kata Primas pada Kamis (3/4), dikutip Channel News Asia.

Dia mengatakan, Uni Eropa tengah menyiapkan respons perang tarif Trump lewat dua tahap.

Respons pertama akan berlaku sekitar pertengahan April terkait aluminium dan baja. Sementara di tahap kedua Uni Eropa akan menargetkan

semua produk dan layanan dengan langkah-langkah yang mungkin sudah siap pada akhir April.

"Kami akan menyerang layanan atau jasa. Misalnya layanan daring yang saat ini tak dikenai pajak, tetapi bisa saja dikenai pajak," ungkap dia, tanpa merinci jasa daring yang dimaksud.

Tanggapan Uni Eropa, kata jubar itu, juga bisa menyangkut akses ke kontrak pengadaan.

Selain merespons soal tarif, Primas juga mengkritik Trump sebagai imperialis.

"Trump menganggap diri penguasa dunia,"

kata dia. "Itu sikap imperialis yang sudah sedikit kita lupakan, tetapi kini muncul lagi dengan kekuatan dan tekad besar."

Dia juga menyampaikan kekhawatiran dia soal tindakan baru Trump.

"Kami yakin kami memang akan melihat dampak buruk terhadap produksi," ungkap Primas.

Dia menyoroti secara khusus dampak kuat itu akan berpengaruh ke anggur dan minuman beralkohol. (cnni/js)

## Jokowi Digugat Rp300 Juta Soal .....

Dari Halaman 1

memaparkan awal mula kliennya membuat gugatan terhadap mantan presiden yang sudah menjabat dua periode di Indonesia tersebut. Ia bilang Afaa menganggap Jokowi tidak berhasil memenuhi janji untuk menjadikan Esemka sebagai mobil nasional yang diproduksi massal.

"Seharusnya janji untuk menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional dapat diwujudkan ketika tergugat I (Jokowi) terpilih dan menjabat sebagai Presiden dengan menjadikan pengembangan Mobil Esemka sebagai program prioritas," kata Sigit.

Jokowi diketahui merupakan sosok yang membuat merek mobil Esemka populer di Indonesia. Kala itu Jokowi yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo sempat menjadikan salah satu mobil besutan Esemka sebagai kendaraan dinas. Jokowi pun terus menegaskan dukungannya agar Esemka bisa diproduksi massal.

Puncak dari itu semua adalah saat Jokowi meresmikan pabrik Esemka di Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali pada tahun 2019. Kala itu Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai Presiden RI.

Sigit melanjutkan kliennya yang juga anak dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman itu bahkan sempat serius ingin membeli dua unit Esemka Bima jenis pikap.



Afaa juga sempat mengunjungi Pabrik Esemka di Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali pada tahun 2021. Namun hasilnya nihil.

"Bertemu dengan tim marketing, tapi cuma ketemu di lobby, tidak boleh melihat unitnya," kata dia.

Sigit bilang hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024, mobil Esemka tidak pernah menjadi mobil nasional. Bahkan Sigit mengatakan produk Esemka tidak terlihat di pasaran otomotif Indonesia.

Kata Sigit kegagalan Esemka menjadi mobil nasional membuktikan Jokowi telah melakukan

tindakan wanprestasi. Afaa lantas menuntut agar para tergugat membayar kerugian sebesar Rp300 juta atau setara dua unit mobil Esemka Bima.

"Kami memohon Ketua Pengadilan Negeri, khususnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum para tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp300 juta kepada penggugat," kata Sigit.

CNNIndonesia.com telah menghubungi pihak Esemka terkait gugatan ini namun hingga kini belum mendapat respons. (cnni/js)

## Harga Kelapa Tembus Rp25 Ribu/ Butir .....

Dari Halaman 1

com. Dadang mengatakan, kenaikan terjadi setelah Idul Fitri. Dia mengatakan stok kelapa dari petani berkurang.

"Semenjak udah Lebaran, karena barangnya langka," ujarnya.

Dadang mengaku kesulitan mendapatkan kelapa di wilayah Pandeglang. Dia mengaku harus menda-

patkan kelapa dari petani di daerah Lebak.

"Di daerah Pandeglang udah nggak ada, susah nyarinya. Ini juga dapat dari daerah Malingping (Lebak)," katanya.

Dadang mengatakan, pendapatannya berkurang gara-gara kenaikan harga tersebut. Dia mengaku biasanya bisa mendapatkan Rp3 juta-Rp4 juta dalam sehari. Namun kini ia hanya bisa dapat Rp2 juta.

Kenaikan harga pun dikeluhkan salah satu pembeli, Mumun. Dia mengatakan, harga kelapa melebihi harga beras.

"Melebihi harga beras ini, beras aja Rp 12 ribu per liter, ini kelapa Rp 25 ribu, aduh bagaimana ini Bupati turunin (harganya)," katanya.

Mumun biasanya membeli kelapa parut seharga Rp 7.000 atau paling mahal Rp 12 ribu. Dia mengaku terpaksa tetap membeli kelapa untuk membuat kue dagangannya.

"Bikin kue, mau nggak mau dibeli kalau nggak pakai kelapa nggak jualan. (Harga kue) Dinaikin lagi, kelapa mahal, kalau nggak dinaikin rugi," ucapnya. (det/js)

## Pemkab Putuskan .....

Dari Halaman 1

dang, dr Asri Ludin Tambunan di lantai II Aula Cendana kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (9/4/2025).

Keputusan untuk memberhentikan tenaga honorer ini merupakan permintaan Bupati Asri Ludin Tambunan sendiri. Dari informasi yang dihimpun, Bupati yang akrab disapa Dokter Aci itu melarang masing-masing OPD untuk membayar gaji honorer mulai April ini.

Keputusannya itu tidak ada satupun yang berani membantahnya.

Adapun tenaga honorer yang harus diberhentikan itu salah satunya adalah tenaga honorer yang masuk kriteria mulai bekerja di mulai tahun 2024 hingga 2025.

Dianggap seharusnya sudah tidak boleh ada lagi perekrutan tenaga honorer di Kabupaten Deli Serdang.

Untuk skema pemberhentian nantinya masing-masing Kepala OPD yang akan mengeluarkan surat keputusan untuk orang-orang yang memenuhi kriteria.

Terkait keputusan untuk merumahkan para tenaga honorer ini, Bupati Aci pun belum bisa untuk dipintai komentarnya secara langsung.

Begitu selesai memimpin rapat koordinasi, Bupati Aci pun langsung bergerak ke Bandara Kualanamu untuk mendampingi Kapolda Sumut melakukan peninjauan arus balik mudik.

Ini merupakan tindak lanjut Bupati Aci berikutnya setelah sebelumnya juga sudah melakukan penataan 200-an tenaga honorer yang sudah masuk data base BKN dari beberapa OPD dan menjadikannya personil Satpol PP.

Sekda Deli Serdang, Timur Tumanggor yang dikonfirmasi membenarkan ada keputusan untuk mem PHK tenaga honorer.

Secara pasti Timur belum dapat memastikan berapa jumlah tenaga honorer yang akan di PHK. Namun diakui ada sekitar ribuan orang yang masuk dalam kriteria.

"Iya (harus) ada pemutusan. Menurut BKPSDM ada 2 ribu kalau tidak salah (yang potensi masuk kriteria PHK)," kata Timur Tumanggor.

Lebih jelas tanya sama Pak Abduh (Kepala BKPSDM) lah karena dia tadi yang sempat sampaikan jumlahnya sama Pak Bupati," kata Timur.

Saat disinggung soal apakah tidak ada lagi solusi lain untuk menyelamatkan para tenaga honorer, Timur menjawab hal ini semua sudah jadi keputusan.

Ia membantah kalau ini termasuk bagian dari efisiensi yang dilakukan Pemkab.

Disebut keputusan ini diambil karena memang sudah ada larangan dari Pemerintah Pusat untuk melarang Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Kota melakukan perekrutan tenaga honorer.

"Karena diundang-undang gitu memang dikatakan (nggak boleh lagi dilakukan perekrutan). Bukan efisiensi tapi ngikuti aturan UU yang dikeluarkan Pemerintah Pusat," kata Timur. (tr/js)



## Ketika Kuota Impor Dihapus

Dari Halaman 1

biakan pangan kita secara drastis. Pasar akan lebih bebas, kata mereka. Siapa saja bisa mengimpor asal mengikuti aturan teknis.

Namun, di balik semangat liberalisasi ini, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar diuntungkan dari kebijakan ini? Apakah ini untuk kepentingan konsumen yang menginginkan harga murah? Atau justru memberi jalan lebar bagi importir besar untuk mendominasi pasar?

Sebagian ekonom mungkin melihat ini sebagai langkah rasional. Sistem kuota selama ini memang menyempitkan celah korupsi dan praktik rente. Namun, menghapus kuota tanpa menyiapkan sistem perlindungan bagi produsen dalam negeri justru bisa menciptakan ketimpangan baru. Ketika keran impor dibuka selebar-lebarnya, posisi tawar petani dan produsen lokal yang lemah makin tergerus. Di saat yang sama, perusahaan besar yang punya akses logistik dan modal akan makin dominan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, saat impor pangan meningkat signifikan, harga di tingkat petani justru cenderung menurun. Pada 2022 misalnya, impor bawang merah naik 38 persen jelang Lebaran. Akibatnya, harga di petani anjlok hampir 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi sekali dua kali, dan selalu memukul petani kecil yang hanya berharap balik modal.

Pemerintah memang berjanji akan tetap menjaga keseimbangan antara harga petani dan konsumen. Tapi tanpa sistem buffer stock, distribusi yang efisien, serta perlindungan harga dasar, janji itu akan sulit diwujudkan. Alih-alih menyelesaikan masalah rente, kita justru menciptakan pasar yang semakin dikuasai pemodal besar.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga bisa berdampak pada ketahanan pangan jangka panjang. Ketika petani merasa tidak dilindungi, insentif untuk terus menanam akan melemah. Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, kita bisa saja mengalami krisis produksi domestik, dan semakin bergantung pada pangan luar negeri.

Padaحال, logikanya sederhana: negara sebesar Indonesia dengan beragam iklim dan jenis tanah, seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Tapi kebijakan yang tidak berpihak telah membuat petani kita kalah di kandang sendiri.

Penghapusan kuota impor memang tampak seperti kebijakan yang progresif di atas kertas. Tapi ia juga mengandung risiko sosial dan ekonomi yang besar jika tidak dibarengi dengan keberpihakan yang jelas terhadap petani dan produsen dalam negeri. Mungkin sudah waktunya kita menata ulang narasi pembangunan pangan kita — dari sekadar efisiensi, menjadi keberlanjutan dan keadilan.

Karena pada akhirnya, kebijakan pangan bukan hanya soal angka dan harga, tapi soal siapa yang tetap bisa hidup dari tanahnya sendiri, dan siapa yang perlahan digusur oleh sistem yang tak lagi ramah.